



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Upaya-Upaya Diplomasi Publik Indonesia Melalui Batik di
Amerika Serikat**

Skripsi

Oleh

Farhanisa Ridayani

2013330140

Pembimbing

Dr. Atom Ginting Munthe, M.S.

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi



Nama : Farhanisa Ridayani
Nomor Pokok : 2013330140
Judul : Upaya-Upaya Diplomasi Publik Indonesia Melalui Batik di Amerika Serikat

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 6 Juli 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Elisabeth A. Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D. :

Sekretaris

Dr. Atom Ginting Munthe, M.S. :

Anggota

Sapta Dwikardana, Ph.D. :

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farhanisa Ridayani

NPM : 2013330140

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Upaya-Upaya Diplomasi Publik Indonesia Melalui Batik di
Amerika Serikat

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip ditulis sesuai kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila di masa yang akan datang diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 21 Juni 2017



Farhanisa Ridayani

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kurnia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul Upaya Diplomasi Publik Indonesia Melalui Batik di Amerika Serikat. Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik Strata-1 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian ini menjelaskan upaya-upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Indonesia di Amerika Serikat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014) melalui instrumen budaya asli Indonesia yaitu batik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada pembaca dan penstudi ilmu hubungan internasional yang berfokus pada bidang diplomasi publik. Penulis memohon maaf atas kekurangan yang terdapat pada penelitian ini, baik mengenai cara penulisan maupun argument yang kurang komprehensif. Sekiranya penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang lain.

Bandung, 21 Juni 2017

Farhanisa Ridayani

ABSTRAK

Nama : Farhanisa Ridayani
NPM : 2013330140
Judul : Upaya-Upaya Diplomasi Publik Indonesia Melalui Batik di Amerika Serikat

Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana pelaksanaan diplomasi publik Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014) melalui batik di Amerika Serikat. Diplomasi publik ini dilaksanakan sebagai upaya Indonesia dalam mencegah terjadinya klaim budaya, khususnya Batik, seperti yang sebelumnya terjadi dengan Malaysia. Upaya-upaya tersebut sangat beragam, diantaranya dengan melaksanakan pameran, kompetisi desain, *workshop* serta membuat film dokumenter tentang Batik di Amerika Serikat. Aktor yang terlibat pun bukan hanya pemerintah namun non-pemerintah Indonesia.

Untuk menghasilkan sebuah penelitian yang komprehensif, maka penulis menggunakan konsep diplomasi publik dari Gyorgy Szondi dan Eytan Gilboa, serta konsep diplomasi multijalur dari Louis Diamond dan John McDonald dalam menjawab rumusan masalah dari penelitian ini yang berbunyi ***“Bagaimana upaya-upaya diplomasi publik yang dilakukan Indonesia melalui Batik di Amerika Serikat?”*** Untuk mendukung jawaban dari rumusan masalah tersebut, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yaitu studi literatur dan dokumen sebagai sumber data, sehingga data yang didapatkan dan didukung oleh konsep yang digunakan akan menghasilkan analisis yang menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

Kata Kunci : Diplomasi Publik, Amerika Serikat, Indonesia, Batik, Budaya.

ABSTRACT

Name : Farhanisa Ridayani
NPM : 2013330140
Title : *Indonesia's Public Diplomacy through Batik in the United States of America.*

This research is purposed to explain how the practice of Indonesia's public diplomacy in Susilo Bambang Yudhyono administration (2009-2014) through Batik in the United States of America. This public diplomacy is used as a preventive act of cultural claim, especially Batik, as in happened before with Malaysia. These acts are various such as exhibition, design competition, workshop, and documenter film about Batik in United States of America. The actors who involved are not only the government but also the non-government actors from Indonesia.

To produce a comprehensive research, therefore the writer is using a contemporary public diplomacy concept from Gyorgy Szondi and Eytan Gilboa, also a multi-track diplomacy concept from Louise Diamond and John McDonald to answer the research question which is "How are the practices of Indonesia's public diplomacy efforts through Batik in the United States of America?" To support the answer from the research question, the writer is using a qualitative methods which are literature review and documents as data source, with the result that the data obtained and supported by the concepts will produce an analysis which answer the research question.

Keywords: Public Diplomacy, United States of America, Indonesia, Batik, Culture.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.2.1. Pembatasan Masalah	7
1.2.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.3.1. Tujuan Penelitian	8
1.3.2. Kegunaan Penelitian	8
1.4. Kajian Literatur	9
1.5. Kerangka Pemikiran	10
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	24
1.6.1. Metode Penelitian	24
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data	25
1.7. Sistematika Pembahasan	25

BAB II	26
INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT	26
2.1. Hubungan Bilateral Indonesia-Amerika Serikat	26
2.1.1. Perjanjian Kemitraan Komprehensif (<i>Comprehensive Partnership Agreement</i>) ...	29
2.1.2. Plan of Action	30
2.2. Diplomasi Publik Indonesia	35
2.3. Diplomasi Budaya Indonesia di Amerika Serikat	36
BAB III	39
BATIK	39
3.1. Sejarah Batik	39
3.1.1. Iwan Tirta	40
3.1.2. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)	46
3.2. Macam-Macam Desain Batik	47
3.2.1. Kawung	48
3.2.2. Ceplok	49
3.2.3. Parang	50
3.3. Perbedaan Batik Antar Kraton	51
3.4. Penetapan Batik Sebagai <i>World Intangible Heritage</i> oleh UNESCO	52
BAB IV	55
UPAYA DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA MELALUI BATIK DI AMERIKA SERIKAT	55
4.1. Aktor	56
4.1.1. Avy Loftus	57

4.1.2. Mey Hasibuan	59
4.2. Sarana.....	62
4.2.1. Indonesian Trade Promote Center (ITPC)	62
4.2.2. Kompetisi Batik	64
4.3. Media	68
4.3.1. Film Dokumenter.....	68
BAB V	72
KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Diplomasi Multi Jalur oleh Louise Diamond dan John McDonald	22
Gambar 2. Kawung	49
Gambar 3. Ceplok	50
Gambar 4. Parang.....	51
Gambar 5. (dari kiri ke kanan) Drew Barrymore, Jessica Alba, Barrack Obama, dan Bill Gates mengenakan batik.	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Diplomasi Publik Tradisional dan Kontemporer	15
--	----

DAFTAR SINGKATAN

AS	:	Amerika Serikat
ASEAN	:	Association of South East Asian Nations
CIA	:	Central Intelligence Agency
ICU	:	International Club in the Upstate
IDP	:	Informasi dan Diplomasi Publik
IGO	:	International Governmental Organization
INGO	:	International Governmental Organization
ITPC (1)	:	Iwan Tirta Private Collection
ITPC (2)	:	Indonesia Trade Promote Center
KJRI	:	Konsultan Jenderal Republik Indonesia
KBRI	:	Kedutaan Besar Republik Indonesia
PRRI	:	Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia
PERMESTA	:	Perjuangan Rakyat Semesta
SAR	:	Search and Rescue
SBY	:	Susilo Bambang Yudhoyono
UNESCO	:	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi merupakan sebuah fenomena dunia yang tidak bisa kita hindari karena meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi informasi. Globalisasi memegang peran penting dalam perkembangan dunia masa kini karena globalisasi telah mempengaruhi berbagai bidang kehidupan manusia seperti makanan, pakaian, hiburan, bahkan sampai gaya hidup sekarang sudah semakin global. Saat ini hampir tidak ada masyarakat yang tidak tersentuh oleh globalisasi (modernisasi), kecuali beberapa kelompok masyarakat yang berada di pedalaman atau terikat adat budaya.¹

Globalisasi dapat memberikan sebuah pengaruh yang positif apabila kita dapat beradaptasi dengan baik, yaitu dengan cara menjadi diri dengan pikiran yang terbuka (*open-minded*) namun tetap selektif terhadap apapun yang masuk dari dunia luar. Dari sudut kebudayaan, globalisasi dapat memperluas wawasan budaya, meningkatkan kemampuan bahasa asing, meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap mental ke arah yang lebih baik, meningkatkan produktivitas kerja, dan memberikan arah dalam perilaku.² Khususnya, jika berhubungan dengan individu lain yang berasal dari negara

¹ Sri Murtono, Hassan Suryono, Martiyono, *3 Pendidikan Kewarganegaraan*, (Quadra, 2006) hal. 75.

² Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Grafindo Media Pratama, 2008) hal. 175.

lain dengan budaya yang berbeda juga, hal ini lah yang menjadi salah satu faktor lahirnya globalisasi budaya.

Budaya merupakan sebuah identitas atau ciri khas bagi suatu negara dan bangsa. Definisi bangsa itu sendiri adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri.³ Ciri khas suatu negara berdasarkan budayanya membuat masyarakat dunia lebih mudah dalam mengenali suatu negara dan juga memudahkan negara tersebut dalam mempertahankan eksistensinya di dunia internasional. Seperti pasta dan pizza yang mengingatkan kita pada negara Italia, baju adat sari di India, tari barongsai China, kartun anime dan manga Jepang, K-Pop Korea Selatan, dan masih banyak kebudayaan-kebudayaan negara lainnya.

Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan kebudayaan. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki banyak penduduk tersebar pada wilayah yang luas dari Sabang hingga Merauke, dan masing-masing daerah pun terdiri dari suku, etnis, dan memiliki adat yang beragam, sebagaimana semboyan *Bhineka Tunggal Ika* yang dimiliki oleh Indonesia. Tarian, lagu, alat musik, rumah adat, pakaian, bahkan tradisi ritual yang ada di masing-masing daerah di Indonesia pun berbeda-beda. Seperti tari Saman dari Aceh, tari Jaipong dari Jawa Barat, tari Pendet dan Kecak dari Bali, lalu ada pakaian khas Minangkabau yaitu baju kurung, Kebaya dari suku Jawa, dan kain Ulos dari suku Batak.

³ Arti Kata Bangsa, <http://kbbi.co.id/arti-kata/bangsa> diakses pada 3 Oktober 2016.

1.2. Identifikasi Masalah

Kebudayaan merupakan salah satu isu yang kini telah dijadikan sebuah instrumen diplomasi oleh negara-negara. Diplomasi dalam bentuk ini dikategorikan sebagai sebuah bentuk *soft diplomacy* atau diplomasi publik. Diplomasi publik dapat dilihat sebagai serangkaian usaha untuk membuka ruang komunikasi baik dalam kerangka adaptasi maupun menegosiasikan unsur-unsur lokal atau nasional di dalam ruang global. Dalam terminologi hubungan internasional unsur-unsur lokal atau nasional yang dinegosiasikan itu dikonsepsikan sebagai kepentingan nasional. Diplomasi publik merupakan sarana yang tepat untuk merebut opini publik dimana salah satunya melalui jalur perkenalan budaya, dimana diplomasi publik melalui pemanfaatan budaya tidak seperti diplomasi konvensional yang menekankan pada penggunaan kekuatan ekonomi dan militer sebagai instrumen utamanya, melainkan lebih kepada pembentukan pemahaman mengenai budaya pada *mindset* masyarakat asing yang datang ke suatu negara.

Diplomasi publik melalui unsur budaya merupakan diplomasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas negara, sikap institusi, kepentingan nasional, dan kebijakan-kebijakan negara dengan melalui pemahaman hasil seni dan budaya. Hal ini juga berfungsi untuk mempromosikan kepentingan nasional melalui pemahaman, menginformasikan, dan mempengaruhi publik diluar negeri. Sebagai salah satu instrumen dari *soft power*, perkembangan diplomasi publik berkembang dengan pesat. Pesatnya perkembangan ini dipicu oleh kenyataan

bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam diplomasi jalur lainnya dianggap kurang efektif mengatasi konflik-konflik antar negara.

Identitas merupakan sesuatu yang sangat penting bagi suatu negara. Sebagai negara yang kaya akan budaya, Indonesia memiliki sebuah budaya yang menjadi ciri khas atau identitasnya, yaitu batik. Meskipun sempat diklaim sebagai warisan budaya negara lain, kini batik telah ditetapkan sebagai warisan dunia yang berasal dari Indonesia oleh UNESCO pada Oktober 2009.⁴

Diklaimnya suatu budaya milik suatu negara oleh negara lain bisa menimbulkan suatu konflik antar negara dan bangsa. Seperti pada tahun 2007, lagu *Rasa Sayange* dan *Reog Ponorogo* milik Indonesia asal Jawa Timur digunakan oleh Malaysia sebagai bahan promosi wisata *Visit Malaysia 2007* namun dengan sebutan lain yaitu Barongan.⁵ Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan, Wiendu Nuryanti menyatakan pemerintah Malaysia sudah tujuh kali mengklaim budaya Indonesia sejak 2007. Bahkan, tari zapin, rendang, gamelan, dan cendol pun tercatat dalam akta budaya Malaysia.⁶ Tidak hanya itu, Angklung pun sempat diklaim sebagai warisan budaya Malaysia dengan sebutan “*bamboo Malay*” pada tahun 2010. Semua kebudayaan ini tercantum pada situs resmi budaya pariwisata Malaysia, dan terdapat sejumlah

⁴ *Indonesian Batik*, <http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/indonesian-batik-00170> diakses pada 1 September 2016.

⁵ Meliana Lily Diana, *Diplomasi Indonesia terhadap Malaysia Studi Kasus: Isu Klaim Budaya*, http://library.unpar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=75792# diakses pada 8 Maret 2017

⁶ Prihandoko, *Malaysia Sudah Tujuh Kali Mengklaim Budaya RI*, <https://m.tempo.co/read/news/2012/06/21/078411954/malaysia-sudah-tujuh-kali-mengklaim-budaya-ri> diakses pada 8 Maret 2017

kesenian lainnya milik Indonesia yang tercantum di dalamnya, seperti gamelan dan kuda lumping.⁷

Perebutan hak milik akan kebudayaan oleh kedua negara ini menimbulkan opini publik yang negatif antar negara. Memuncaknya perseteruan antara Indonesia dan Malaysia adalah pada klaim Tari Tortor dan alat music Gordang Sambilan dari Mandailing. Rencana pemerintah Malaysia mengakui tari tortor dan alat musik Gordang Sambilan mencuat setelah kantor berita Bernama di Malaysia melansir pernyataan Menteri Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia Datuk Seri Rais Yatim tentang rencananya mendaftarkan kedua budaya masyarakat Sumatera Utara itu dalam Seksyen 67 Akta Warisan Kebangsaan 2005.⁸ Hal ini membuat warga Indonesia khususnya suku Mandailing di Sumatera Utara kesal dan melakukan aksi protes di depan Kantor Konsulat Jenderal Malaysia di Medan dan di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta.⁹ Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Sri Anifah Aman mengecam aksi protes ini, karena aksi protes yang dilakukan masyarakat Indonesia tidak berlangsung dengan damai namun terdapat kekerasan dan pelemparan benda-benda keras ke dalam kompleks Kedutaan Besar Malaysia.¹⁰

⁷ Loc. Cit, Meliana.

⁸ Loc. Cit, Prihandoko.

⁹ Arfi Bambani Ari, *Tor-tor dan Taktik Malaysia* diakses di <http://sorot.news.viva.co.id/news/read/328559-tor-tor-dan-taktik-malaysia> pada 8 Maret 2017

¹⁰ Nurdin, *Hubungan Indonesia-Malaysia Tegang: Kemenlu Malaysia Kecam Keras Aksi Unjuk Rasa di Kedutaannya!* diakses di http://www.kompasiana.com/nurdinnurdin/hubungan-indonesia-malaysia-tegang-kemenlu-malaysia-kecam-keras-aksi-unjuk-rasa-di-kedutaannya_55115e76a333114147ba7d27 pada 8 Maret 2017

Namun konflik ini sudah selesai karena Malaysia sudah mengaku bahwa ia tidak mengklaim namun hanya menggunakan dikarenakan budaya tersebut memang telah berkembang lama di negaranya.¹¹

Sejak banyaknya klaim budaya Indonesia oleh Malaysia, Indonesia bekerja keras untuk mematenkan budayanya agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Seperti yang terjadi sebelumnya pada Indonesia dengan Malaysia. Masyarakat kedua negara ini dipandang berada di bawah rumpun yang sama yaitu Melayu, oleh karena itu menjadi suatu hal yang wajar ketika masyarakat di kedua negara ini memiliki kemiripan dalam hal kebudayaan.¹²

Setelah itu, Indonesia tetap gencar melakukan promosi agar batik Indonesia semakin dikenal sebagai budaya milik Indonesia. Upaya ini merupakan sebuah tindakan preventif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar peristiwa klaim budaya seperti sebelumnya tidak terjadi lagi. Amerika Serikat merupakan negara sasaran Indonesia untuk mempromosikan batiknya untuk menghindari adanya klaim dari negara tersebut karena apabila Amerika Serikat melakukan klaim serupa Malaysia, dampak yang terjadi bisa lebih besar dari peristiwa sebelumnya.

Amerika Serikat merupakan negara adidaya di dunia. Apa yang dilakukannya atau apapun yang terjadi di dalam negaranya akan menjadi sorotan dunia internasional. Pengaruh yang dimiliki oleh negara ini sangatlah besar. Dan

¹¹ Kemendagri, *Hanya Menggunakan, Malaysia Tidak Klaim Seni dan Budaya Indonesia* diakses di <http://www.kemendagri.go.id/news/2007/12/28/hanya-menggunakan-malaysia-tidak-klaim-seni-dan-budaya-indonesia> diakses pada 3 Oktober 2016.

¹² Tonny Dian Effendi, *Diplomasi Publik Sebagai Pendukung Hubungan Indonesia-Malaysia* diakses di <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/view/540/524> pada 8 Maret 2017

untuk suatu kebudayaan negara lain dapat menembus negara ini dan bahkan mencapai popularitas tinggi merupakan sebuah prestasi bagi negara pemilik kebudayaan tersebut. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian yang diberi judul diplomasi publik Indonesia melalui batiknya di Amerika Serikat dalam upaya membangun citra baik Indonesia.

Dengan semakin bertambah popularitas batik itu sendiri, apakah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mempromosikan batik tersebut di Amerika Serikat?

1.2.1. Pembatasan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini akan membahas beberapa cakupan yang berhubungan dengan topik penelitian, yaitu:

- Penelitian dibatasi pada usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mempromosikan batik, seperti anggaran yang disiapkan, pengiriman pembatik ke luar negeri, seminar dan lainnya.
- Penelitian hanya memfokuskan upaya yang dilakukan pemerintah setelah Batik dijadikan warisan dunia oleh UNESCO (yaitu pada Oktober 2009) lebih spesifiknya selama masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yaitu 2009-2014 agar fokus pada kebijakan di periode satu pemerintahan.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan sebelumnya serta batasan masalah yang telah ditetapkan, telah didapatkan sebuah gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang akan dibahas dengan mengacu kepada pertanyaan penelitian **“Bagaimana upaya-upaya diplomasi publik yang dilakukan Indonesia melalui batik di Amerika Serikat?”**

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan dengan cara menjelaskan apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan diplomasi publik yakni mempromosikan batik di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya klaim budaya setelah penetapannya sebagai warisan dunia oleh UNESCO.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

- Memberi gambaran dan pemahaman lebih lanjut mengenai upaya diplomasi publik Indonesia terhadap Amerika Serikat melalui batik
- Sebagai bahan referensi bagi para pengkaji ilmu hubungan internasional di kemudian hari.

1.4.Kajian Literatur

Di dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan 3 (tiga) buah sumber yang akan dijadikan sebagai kajian literatur. Sumber pertama adalah buku yang berjudul “*Diplomasi dalam Politik Global*” yang disusun oleh Dr. Sukawarsini Djelantik. Buku terbitan tahun 2016 ini berisikan kumpulan materi perkuliahan, kuliah tamu, hasil penelitian, skripsi, dan tesis yang merupakan hasil pemikiran para mahasiswa program sarjana dan pascasarjana (Magister Ilmu Sosial) di Universitas Katolik Parahyangan.

Di dalam buku ini, terdapat sebuah bab yang berisikan tulisan tentang diplomasi publik. Di dalam bab ini terdapat sebuah karya tulis ringkasan sebuah skripsi berjudul “*Diplomasi Publik Tiongkok Melalui Peran Jacky Chan*” karya Trissia Wijaya, lalu ada “*Diplomasi Budaya Indonesia di Korea Selatan*” karya Regina Faustine Darwanto. Tiga karya tulis ini merupakan sebuah penelitian yang topiknya serupa dengan topik yang dimiliki oleh penulis, oleh karena itu penulis mencoba mempelajari bagaimana diplomasi publik dilakukan oleh sebuah negara di negara lain melalui media yang berbeda-beda pula, salah satunya adalah budaya.

Sumber selanjutnya yang penulis gunakan adalah sebuah jurnal yang berjudul “*Model Diplomasi Indonesia Terhadap UNESCO Dalam Mematenkan Batik Sebagai Warisan Budaya Indonesia Tahun 2009*” yang ditulis oleh Leni Putri Lusianti dan Faisyal Rani pada tahun 2012. Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana diplomasi multijalur berguna dalam membantu pemerintah Indonesia dalam mendorong UNESCO untuk

mematenkan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Dengan jurnal ini, penulis mencoba memahami bagaimana sebelumnya upaya diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan batik dan bentuk diplomasi apa saja yang digunakannya.

Sumber yang ketiga adalah jurnal berjudul "*Soft Power Diplomacy (Studi Tentang Diplomasi Batik Indonesia)*" karya Anna Yulia Hartati. Jurnal ini menjelaskan tentang konsep diplomasi dengan menggunakan *soft power* dan contoh kasus tentang Indonesia yang menggunakan batik sebagai instrumen diplomasinya. Kelebihan dari jurnal ini adalah kontennya yang sangat membantu penulis dalam penelitian ini, karena pemaparannya yang jelas tentang studi diplomasi melalui batik, namun kekurangan dari jurnal ini adalah pembahasannya terlalu umum, dengan begitu penelitian penulis akan mengisi kekosongan jurnal ini dengan mengkhususkan pembahasan mengenai sasaran diplomasi Indonesia yaitu Amerika Serikat.

1.5. Kerangka Pemikiran

Sebagai suatu ilmu yang multidisipliner, hubungan internasional termasuk sebagai satu kajian yang membutuhkan disiplin ilmu lain sebagai bahan referensinya untuk menyelesaikan isu-isu yang ada seperti dari disiplin ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, sosiologi, psikologi, dan masih banyak lagi lainnya. Isu-isu yang menjadi bahasan dalam hubungan internasional pun terbagi menjadi 2 (dua), yaitu isu tradisional dan non-

tradisional. Isu-isu tradisional di antara lain seperti isu politik, keamanan dan militer, sedangkan isu-isu non-tradisionalnya adalah seperti isu ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya.

Memasuki era modern ini, isu-isu yang lebih berkembang adalah isu-isu non-tradisional atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan *low politics*. Isu-isu ini lebih sering muncul dibandingkan dengan isu tradisional dikarenakan perubahan zaman yang ada dan permasalahan yang muncul pun semakin kompleks seiring dengan munculnya aktor-aktor lainnya dalam hubungan internasional selain negara, seperti IGO (*International Governmental Organization*), INGO (*International Non-Governmental Organization*), perusahaan multinasional, bahkan individu sekali pun sekarang telah dianggap sebagai aktor dalam hubungan internasional. Dengan semakin banyaknya aktor yang ada, maka isu-isu yang ada pun semakin bertambah dan semakin kompleks.

Untuk membahas isu baik tradisional maupun non-tradisional, negara-negara menanggapi dengan melakukan aktivitas yang biasa kita kenal dengan politik luar negeri. Politik luar negeri yang dilakukan tiap negara tentunya berbeda-beda, seperti pada contohnya yaitu Indonesia yang memegang prinsip bebas aktif. Dengan prinsipnya ini, sudah dipastikan kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh Indonesia pun akan berbeda dengan negara lainnya, begitu juga dengan cara diplomasinya.

Perubahan mendasar dunia di abad ke-21, khususnya terkait dengan teknologi informasi telah memaksa negara-negara untuk menilai kembali

pelaksanaan diplomasi.¹³ Seperti yang dikatakan oleh Harold Nicholson, “dengan perkembangan komunikasi, peran dan fungsi seorang diplomat telah semakin berkurang sehingga diplomat sekarang telah menurun statusnya menjadi juru tulis yang bertugas mencatat pesan-pesan telepon.”¹⁴

Kesadaran akan pentingnya keterlibatan publik dalam diplomasi diawali dengan asumsi bahwa pecahnya peperangan di berbagai belahan dunia telah menunjukkan bahwa organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak dirancang untuk menangani konflik-konflik internasional. Kesadaran inilah yang semakin menguatkan munculnya ide “*citizen diplomacy*” atau diplomasi publik.¹⁵ Berkembangnya ide diplomasi publik juga muncul karena kesadaran bahwa era globalisasi dan teknologi telah memaksa aktor-aktor pemerintah/diplomat resmi mengakui relevansi yang semakin besar oleh aktor-aktor trans-nasional (perusahaan-perusahaan multinasional, NGO, IGO) dalam diplomasi internasional.¹⁶

Secara umum diplomasi publik dipahami sebagai suatu upaya untuk mempengaruhi publik internasional (negara lain) demi tercapainya kepentingan nasional suatu negara. Upaya ini biasanya dilakukan dengan membentuk sebuah jaringan komunikasi sebagai wadah promosi kebijakan luar negeri. Dengan dikoordinasi oleh pemerintah, pihak-pihak yang terlibat

¹³ Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi Antara Teori dan Praktik*, (Graha Ilmu, 2008), hal. 15.

¹⁴ Harold Nicholson, *Diplomacy Then and Now*, in *The Theory and Practice of International Relations*, dalam William C. Olson and Fred A. Sondermann, 2nd Edition, Prentice Hall, Englewood, NJ, 1974.

¹⁵ Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi Publik dan Peran Epistemik Community*, Buletin Pejambon 6, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2005, hal. 68-69.

¹⁶ Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi Antara Teori dan Praktik*, (Graha Ilmu, 2008), hal. 77.

dalam upaya ini adalah *non-state actors* seperti NGO, media massa, kelompok masyarakat, partai politik, parlemen, individu (tokoh agama, wartawan, artis), dan lainnya.¹⁷

Seperti yang ditemukan pada pertengahan 1960-an oleh mantan diplomat A.S. Edmund Gullion, diplomasi publik dikembangkan sebagian untuk menjauhkan kegiatan informasi pemerintah dari luar negeri dari istilah propaganda, yang telah memperoleh konotasi yang merendahkan.¹⁸ Selama bertahun-tahun, diplomasi publik juga telah mengembangkan makna yang berbeda dari urusan publik, yang mengacu pada kegiatan dan program pemerintah yang dirancang untuk mengkomunikasikan pesan kebijakan kepada khalayak domestiknya sendiri.

Dalam beberapa dekade terakhir, diplomasi publik telah dipandang secara luas sebagai sarana transparan untuk sebuah negara berdaulat berkomunikasi dengan publik di negara lain yang bertujuan untuk menginformasikan dan mempengaruhi khalayak luar negeri untuk tujuan mempromosikan kepentingan nasional dan memajukan tujuan kebijakan luar negerinya.¹⁹ Dalam pandangan tradisional ini, diplomasi publik dipandang sebagai bagian integral dari diplomasi negara-ke-negara, yang berarti pelaksanaan hubungan resmi, biasanya secara pribadi, antara perwakilan resmi (pemimpin dan diplomat) yang mewakili negara-negara berdaulat. Dalam hal ini, diplomasi publik mencakup kegiatan seperti program pertukaran

¹⁷ Op. Cit., Sukawarsini Djelantik.

¹⁸ USC Center on Public Diplomacy, *What is Public Diplomacy*, diakses di <https://uscpublicdiplomacy.org/page/what-pd> pada 31 Mei 2017

¹⁹ Ibid.

pendidikan untuk ilmuwan dan mahasiswa; program pengunjung; pelatihan bahasa; acara budaya dan pertukaran; dan penyiaran radio dan televisi. Kegiatan semacam itu biasanya berfokus pada peningkatan citra atau reputasi negara "pengirim" sebagai cara untuk membentuk lingkungan kebijakan yang lebih luas di negara "penerima".

Dengan seiring berkembangnya zaman, terdapat perubahan pada pelaksanaan diplomasi publik tersebut. Perbedaan antara diplomasi publik dengan diplomasi kontemporer dapat dilihat melalui tabel yang dikemukakan oleh Gyorgy Szondi berikut:

Tabel 1. Perbandingan Diplomasi Publik Tradisional dan Kontemporer

	Traditional Public Diplomacy	21 st Century Public Diplomacy
<i>Conditions</i>	Conflict, tension between states	Peace
<i>Goals</i>	To achieve political change in target countries by changing behaviour	Political and economic interest promotion to create receptive environment and positive reputation of the country abroad
<i>Strategies</i>	Persuasion Managing publics	Building and maintaining relationships Engaging with publics
<i>Direction of communication</i>	One-way communication (monologue)	Two-way communication (dialogue)
<i>Research</i>	Very little, if any	PD based on scientific research where feedback is also important
<i>Message context</i>	Ideologies Interest Information	Ideas Values Collaboration
<i>Target audiences</i>	'General' public of the target nation; Sender and receivers of messages	Segmented, well-defined publics + domestic publics; Participants
<i>Channels</i>	Traditional mass media	Old and new media; often personalized
<i>Budget</i>	Sponsored by government	Public and private partnership

Menurut Eytan Gilboa, aktivitas diplomasi dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian yaitu meliputi tujuan, media atau opini publik, pemerintah, dan instrument diplomasi publik itu sendiri.²⁰

1. Tujuan

a. *Reactive*: Suatu kegiatan akan dikategorikan ke dalam kategori ini bila kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tanggapan dari suatu kejadian, dengan tujuan untuk meminimalisir kerugian yang mungkin ditimbulkan maupun untuk memanfaatkan kejadian tersebut untuk kepentingan negara yang bersangkutan. Kegiatan dalam kategori ini cenderung dilaksanakan dalam kurun waktu yang berdekatan dengan kejadian yang menyebabkan munculnya kegiatan tersebut.

b. *Proactive*: Kegiatan yang dikategorikan dalam kategori ini merupakan kegiatan yang sifatnya menjangkau/memancing/menghimpun (*reach out*) pada target pelaksanaannya – baik pemerintah maupun masyarakat dari negara lain – untuk dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan bersangkutan. Kegiatan dalam kategori ini biasanya tidak dilaksanakan secara rutin.

c. *Relationship*: Kegiatan yang dikategorikan dalam kategori ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun serta mempertahankan suatu hubungan, baik antar-negara maupun antar-

²⁰ Eytan Gilboa, *Searching for a Theory of Public Diplomacy*, The Annals of The American Academy of Political and Social Science, Vol. 616, 2008, hal 71-72. terdapat pada *Proposal Diplomasi Publik dan Nation Branding* oleh Ratih Indraswari, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, 2015, hal. 5-8.

masyarakat. Kegiatan dalam kategori ini biasanya dilaksanakan secara rutin dan memiliki sifat berkelanjutan.

2. Media atau opini publik:

a. *News management*: Kegiatan yang termasuk dalam kategori ini memiliki karakteristik berupa adanya usaha untuk mempengaruhi bagaimana sebuah informasi disajikan kepada masyarakat (target) oleh media masa dengan tujuan untuk meminimalisir publikasi yang diindikasikan dapat memberikan kesan negatif.

b. *Strategic communication*: Kegiatan yang dikategorikan ke dalam kategori ini biasanya merupakan kegiatan yang mendorong hadirnya sebuah kerja sama dengan menyediakan data-data dan memfasilitasi kerja sama tersebut.

c. *Building favorable condition*: Kegiatan yang dapat disertakan dalam kategori ini adalah kegiatan yang tujuan penyelenggaraannya adalah membentuk sebuah keadaan di mana pihak-pihak yang ditargetkan dapat saling memahami kondisi satu sama lain secara menyeluruh, baik berdasarkan keadaan sosial-politik, latar belakang sejarah, keadaan ekonomi, serta keadaan politik. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan dapat tercipta kondisi yang mendukung lahirnya kerja sama yang lebih erat di antara pihak-pihak yang terlibat.

3. Pemerintah:

a. *Closely linked*: Kegiatan yang masuk dalam kategori ini merupakan kegiatan yang digagas dan dilaksanakan langsung oleh pemerintah/negara, di mana negara terlibat aktif dalam proses penyelenggaraan, dari tahap persiapan sampai tahap evaluasi kegiatan.

b. *Partially linked*: Kegiatan yang masuk ke dalam kategori ini merupakan kegiatan yang dalam proses pelaksanaannya melibatkan pemerintah/negara pada salah satu aspek pelaksanaan kegiatan bersangkutan, namun peranan pihak non-pemerintah lebih dominan.

c. *Remotely linked*: Kegiatan yang dikategorikan dalam kategori ini merupakan kegiatan yang dalam proses pelaksanaannya tidak melibatkan pemerintah/negara, di mana keterlibatan pemerintah sangatlah terbatas, terutama pada tahap perizinan.

4. Instrumen Diplomasi Publik:

a. *Advocacy*: Kegiatan yang menggunakan instrumen ini berupaya mempengaruhi proses pengambilan keputusan serta proses pembuatan kebijakan di suatu negara melalui pengerahan opini publik atas suatu isu tertentu. Pengguna instrumen ini cenderung mengangkat isu yang menarik bagi masyarakat dan jarang dialami oleh si pengguna.

b. *International broadcasting*: Instrumen diplomasi ini memanfaatkan penggunaan teknologi informasi, terutama televisi dan radio, untuk berkomunikasi serta menyampaikan informasi kepada masyarakat.

c. *Cyber public diplomacy*: Instrumen diplomasi ini menggunakan teknologi komunikasi baru seperti internet, telepon genggam, serta alat-alat elektronik lainnya sebagai salah satu media diplomasi publik untuk menjangkau target masyarakat yang lebih luas.

d. *International public relations*: Instrumen ini dilakukan terutama dengan tujuan untuk mengendalikan reputasi negara dengan mengubah opini, kebijakan, serta perilaku negara lain terhadap negara pelaku. Instrumen ini dapat pula digunakan untuk memperbaiki reputasi yang dimiliki oleh suatu negara.

e. *Corporate diplomacy*: Instrumen ini biasanya dilakukan oleh sebuah organisasi untuk membentuk opini dari para pemegang kepentingan (*stakeholders*) dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah kondisi di mana kerja sama dapat dibentuk serta dipertahankan.

f. *Diaspora public diplomacy*: Instrumen ini secara aktif melibatkan diaspora – warga negara dari suatu negara yang menetap di negara lain – baik melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan maupun melalui kehidupan sehari-hari dari warga negara bersangkutan. Keberadaan diplomasi publik dengan melibatkan diaspora ini seringkali dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat pemahaman inter-kultural sehingga dapat mendorong terciptanya sebuah persepsi positif atas suatu negara.

g. *Diplomasi budaya*: Instrumen ini digunakan untuk menumbuhkan pemahaman atas identitas suatu budaya. Hal ini dapat dilakukan melalui adanya pertukaran ide, nilai, atau tradisi yang menjadi unsur-unsur pembentuk

sebuah budaya di masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memperkuat hubungan, kerja sama sosial di masyarakat, hingga pencapaian kepentingan nasional.

h. *Exchanges*: Instrumen ini biasanya digunakan dengan tujuan untuk meminimalisir stereotip melalui komunikasi inter-kultural. Instrumen ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam bagi masyarakat yang terlibat langsung di dalam penyampaian. Adanya komunikasi inter-kultural secara langsung akan membuat penyampaian unsur budaya melalui instrumen ini menjadi lebih efektif.

i. *Branding*: Instrumen ini digunakan untuk membentuk ide tertentu mengenai negara yang menggunakan instrumen ini, dengan tujuan untuk mempengaruhi bagaimana pikiran serta perasaan masyarakat mengenai suatu negara, yang pada akhirnya akan menjadi karakteristik negara bersangkutan. Hal ini perlu dilakukan terutama untuk membentuk opini masyarakat di negara-negara demokratis, yang pada akhirnya diharapkan dapat mempengaruhi proses pengambilan kebijakan negara tersebut.

Diplomasi publik dapat dilihat sebagai serangkaian usaha untuk membuka ruang komunikasi baik dalam kerangka adaptasi maupun menegosiasikan unsur-unsur lokal atau nasional di dalam ruang global. Dalam terminologi hubungan internasional unsur-unsur lokal atau nasional yang dinegosiasikan itu dikonsepsikan sebagai kepentingan nasional. Diplomasi publik merupakan sarana yang tepat untuk merebut opini publik dimana salah satunya melalui jalur pengenalan budaya, dimana diplomasi publik melalui

pemanfaatan budaya tidak seperti diplomasi konvensional yang menekankan pada penggunaan kekuatan ekonomi dan militer sebagai instrumen utamanya, melainkan lebih kepada pembentukan pemahaman mengenai budaya pada pola pikir masyarakat asing yang datang ke suatu negara.

Diplomasi ini sendiri terbagi menjadi dua jalur, jalur pertama adalah jalur resmi atau jalur konvensional yaitu jalur diplomasi yang dilakukan oleh antar pemerintah. Dan jalur yang kedua adalah jalur non-pemerintah atau yang biasa disebut dengan jalur non-resmi. Kegagalan diplomasi jalur pertama telah mengembangkan pemikiran untuk meningkatkan diplomasi publik sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan konflik-konflik antar negara.²¹ Oleh karena itu, perlu dilakukan terobosan-terobosan lain guna melengkapi aktivitas-aktivitas diplomasi jalur pertama dengan melibatkan lebih banyak masyarakat melalui aktivitas diplomasi publik.²²

Seorang duta besar Amerika Serikat, John McDonald, adalah penggagas diplomasi multijalur sekaligus pendiri *Institute for Multi Track Diplomacy* (IMTD), McDonald memperluas jalur diplomasi yang kedua menjadi empat jalur yang berbeda, diantaranya adalah *conflict resolution professional, business, private citizen, dan media*.²³

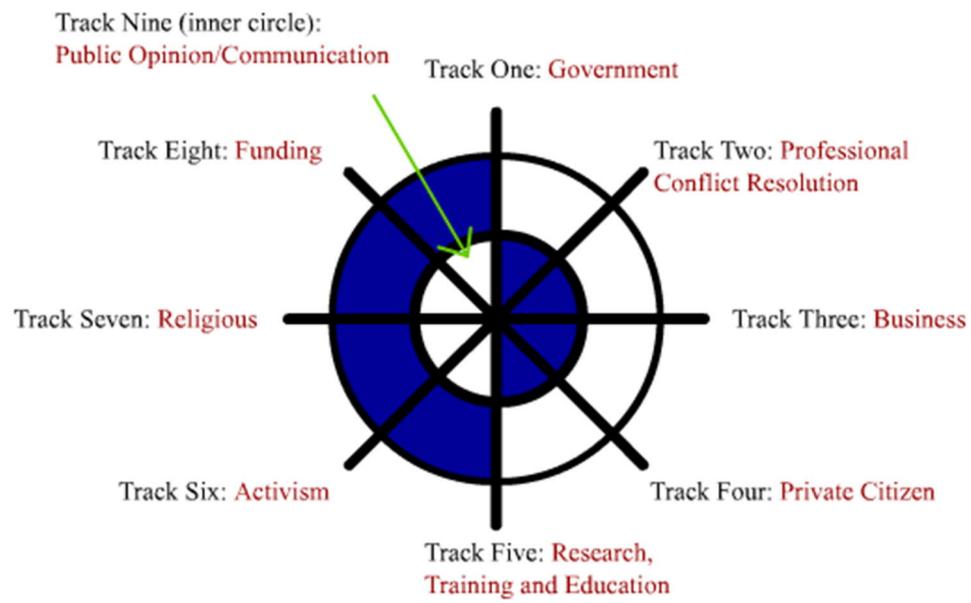
Setelah itu, Louise Diamond, yang merupakan *co-founder Institute for Multi Track Diplomacy* (IMTD) juga bersamaan dengan McDonald,

²¹ John McDonald, *Further Exploration of Track Two Diplomacy*, in Louis Kreisberg and Stuart J. Thorson (Eds), *Timing the De-Escalation of International Conflict*, (Syracuse University Press, 1991), hal. 201-220.

²² Loc. Cit., Sukawarsini Djelantik, hal. 190.

²³ Louise Diamond and John W. McDonald, *Multitrack Diplomacy, A System Approach to Peace*, (Kumarian Press, 1996).

menambahkan lagi 5 (lima) jalur lainnya, yaitu, *religion, activism, research, training and education, dan philanthropy*.²⁴



Gambar 1. Diagram Diplomasi Multi Jalur oleh Louise Diamond dan John McDonald

Model di atas menunjukkan posisi sembilan aktor yang terlibat dalam diplomasi publik.

Pertama, *Government* memiliki peran penting untuk melakukan sebuah diplomasi antar negara karena pemerintah memiliki kekuasaan dalam suatu negara tersebut. Kedua, *Non-Government* atau *Professional Conflict Resolution*, terkadang keterlibatan mereka menjadikan sebuah kesepakatan yang lebih besar karena aktivitasnya adalah mediasi, konsultasi, konferensi,

²⁴ Ibid.

dan lainnya. Ketiga, *Business*, jalur ini lebih potensial daripada jalur lainnya karena biasanya bisa dilakukan dengan membuat sebuah perjanjian perdagangan, menjadikan adanya persahabatan internasional. Keempat, *Private Citizen*, meskipun mereka tidak ada di sebuah forum, mereka akan menggerakkan diri mereka sendiri untuk melakukan sebuah diplomasi contohnya dalam *exchange programs*, *voluntary programs*, dan lain sebagainya. Kelima, *Research, Training, and Education*, pusat studi ini juga memiliki peran untuk melakukan sebuah diplomasi. Studi mendalam terhadap suatu isu bisa memberikan sebuah referensi atau rekomendasi bagi pejabat negara tentang pilihan kebijakan. Keenam, *Activism*, berperan untuk mendesak pejabat negara dalam merubah kebijakan, aktivitas, dan lain sebagainya. Ketujuh, *Religious*, tokoh agama juga memiliki peran penting dalam hal berdiplomasi, karena ini bisa menjadi sebuah cara untuk menyelesaikan konflik agama. . Kedelapan, *Funding*, ini bisa menjadi sebuah alat untuk berdiplomasi karena sejatinya setiap negara akan butuh bantuan dari negara-negara lain sekalipun itu negara *super power*. Dan terakhir yang kesembilan, *Public Opinion/Communication*, jalur ini berada pada *inner circle* karena setiap jalur sebenarnya memiliki sebuah opini publik dan opini publik ini terbentuk dari media massa, dan seringkali apa yang diberitakan oleh media bukanlah yang sebenarnya, bisa jadi sebuah propaganda. Permasalahan dari jalur ini adalah, apabila sebuah isu tidak diberitakan oleh media, maka isu tersebut bisa dianggap tidak ada (*CNN-ification*).

Kebudayaan merupakan salah satu isu yang kini telah dijadikan sebuah instrumen diplomasi oleh negara-negara. Diplomasi dalam bentuk ini dikategorikan sebagai sebuah bentuk *soft diplomacy* atau diplomasi publik. Diplomasi publik dapat dilihat sebagai serangkaian usaha untuk membuka ruang komunikasi baik dalam kerangka adaptasi maupun menegosiasikan unsur-unsur lokal atau nasional di dalam ruang global. Dalam terminologi hubungan internasional unsur-unsur lokal atau nasional yang dinegosiasikan itu dikonsepsikan sebagai kepentingan nasional.

Diplomasi publik didefinisikan sebagai upaya mencapai kepentingan nasional suatu negara. Dengan kata lain, jika proses diplomasi tradisional dikembangkan melalui mekanisme *government-to-government relations* maka diplomasi publik lebih ditekankan pada *government-to-people* atau bahkan *people-to-people relations*.²⁵ Tujuannya, agar masyarakat internasional mempunyai persepsi baik tentang suatu negara, sebagai landasan sosial bagi hubungan dan pencapaian kepentingan yang lebih luas.²⁶

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut John W. Creswell, metode penelitian kualitatif merupakan metode yang menggunakan data berdasarkan *natural*

²⁵ Benny Susetyo PR, *Peranan Diplomasi Publik* diakses di [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/062.%20Peranan%20Diplomasi%20Publik%20\(18%20Desember%202008\).pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/062.%20Peranan%20Diplomasi%20Publik%20(18%20Desember%202008).pdf) pada 17 Oktober 2016.

²⁶ Ibid.

setting.²⁷ Metode penelitian ini menggunakan berbagai bentuk data seperti dokumen, hasil wawancara, dan melakukan observasi. Berbagai data tersebut lalu diolah dan diselaraskan serta disusun sehingga menjadi sebuah penelitian yang baik dan memberikan sebuah pemahaman bagi pembacanya.²⁸

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi literatur melalui buku, artikel, dan jurnal.

1.7. Sistematika Pembahasan

Bab I membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi sejarah tentang hubungan bilateral dalam bentuk diplomasi publik antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

Bab III berisi tentang batik Indonesia.

Bab IV berisi penjelasan mengenai upaya-upaya diplomasi publik Indonesia melalui batik di Amerika Serikat.

Bab V berisi kesimpulan.

²⁷ John W. Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. edisi ke-3. SAGE Publications. 2009. hal 175.

²⁸ *Ibid*.